



RENCANA KERJA (RENJA) | 2021



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MADIUN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkah karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ini juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategi (Renstra) yang akan diwujudkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun dalam berjangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2018–2023. Rencana Kerja (Renja) juga menggambarkan target sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada pelaksanaan APBD tahun 2021 sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi kepala daerah. Selain itu Rencana Kerja ini memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kegiatan maupun jumlah anggaran.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 ini diharapkan target dan komitmen kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun pada tahun 2021 dapat tercapai lebih efektif dan terukur.

Madiun, April 2020

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MADIUN

Dra. SITI ZUBAIDAH, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19690709 198809 2 001

DAFTAR ISI

- Kata Pengantar
- Daftar Isi

BAB I	: PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	3
	1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II	: EVALUASI KINERJA OPD	
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	8
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
	2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	30
	2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	33
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	50
BAB III	: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	58
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	61
	3.3 Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021	61
BAB IV	: PENUTUP	72

- Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dokumen Renja merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan PD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan Renja PD sangat ditentukan oleh kemampuan PD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi PD.

Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja PD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja PD juga digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan Renja PD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja PD, orientasi mengenai RKPD dan Renja PD, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Dalam prosesnya penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena

itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan RKPD oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan Renja PD Tahun 2021 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020. Dokumen RENJA Tahun 2021 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Madiun Tahun 2021.

Renja PD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra PD dan RPJMD, bagi RKA, KUA, PPAS dan RAPBD. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja PD, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan didalam Renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;
- c. Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun bersangkutan dan tahun selanjutnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah ;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diverifikasi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun nomor 3 tahun 2019;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
- 10) Peraturan Bupati Madiun Nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 56 tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja PD adalah:

- 1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.

- 2) Sebagai acuan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok fungsi PD dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Madiun.
- 3) Memberikan gambaran rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas PPKB & PPPA tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja K/L dan Renja Propinsi/ Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

Sub-bab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di

rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Sub-bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tahun 2021. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir, dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:
 1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
(apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
 - c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah, nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

1.5. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah maka Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2019 telah melaksanakan 7 (tujuh) program dan 32 kegiatan. Masing-masing program tersebut akan dianalisis sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 586.019.083,00; dengan realisasi anggaran APBD sebesar Rp. 563.435.686,00 atau 96,15%

Indikator programnya adalah : Prosentase pengelolaan administrasi umum, keuangan dan perlengkapan. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output kegiatan : Jasa telepon, listrik dll yang terbayar selama 12 bulan.

Realisasi anggaran : Rp. 74.831.478,00 dari jumlah anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 55.923.112,00 (74,73 %)

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

b. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Output kegiatan : Jumlah ATK yang diadakan selama 12 bulan.

Realisasi anggaran : Rp. 55.450.090,00 dari anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 54.643.990,00 (98,55%).

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

c. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Output kegiatan : Jumlah barang cetak amplop, stop map dan foto copy yang diadakan selama 12 bulan.

Realisasi anggaran : Rp. 19.173.290,00 dari anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 19.155.500,00 (99,91%).

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

d. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Output kegiatan : Peralatan rumah tangga

Realisasi anggaran : Rp. 12.715.505,00 dari anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 12.713.505,- (99,98%).

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

e. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Output kegiatan : Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan selama 12 bulan.

Realisasi anggaran : Rp. 1.800.000,00 dari anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 1.800.000,00 (100,00%)

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

f. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Output kegiatan : Jumlah Snack, makan dan minum rapat harian yang diadakan selama 12 bulan.

Realisasi anggaran : Rp. 49.314.520,00 dari anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 47.016.500,00 (95,34%).

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

g. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Output kegiatan : Jumlah perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan.

Realisasi anggaran : Rp. 250.000.000,00 dari anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 249.843.079,00 (99,94%).

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

h. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Output kegiatan : Jumlah perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan.

Realisasi anggaran : Rp. 12.000.000,00 dari anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 11.940.000,00 (99,50%).

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

i. Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Kinerja SKPD

Output kegiatan : Jumlah tenaga non PNS/PKWT (Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu) yang siap pakai selama 12 bulan.

Realisasi anggaran : Rp. 110.734.200,00 dari anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 110.400.000,00 (99,70%)

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 230.197.283,00; proporsi realisasi dari anggaran sebesar Rp. 228.457.575,00 atau 99,24%

Indikator programnya adalah : Prosentase pengelolaan administrasi umum, keuangan dan perlengkapan. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Output kegiatan : Jumlah gedung kantor yang terpelihara dengan baik.

Realisasi anggaran : Rp. 19.997.150,00 dari anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 19.997.150,00 (100,00%)

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

Output kegiatan : Suku cadang, BBM, Pelumas, pajak kendaraan dan servis kendaraan dinas/operasional tersedia selama 12 bulan.

Proporsi realisasi : Rp. 173.360.008,00 dari anggaran terealisasi sebesar Rp. 171.982.335,00 (99,21%)

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.

Output kegiatan : Jumlah mebeleur yang terpelihara dengan baik selama 12 bulan.

Proporsi realisasi : Rp. 3.850.000,00 dari anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 3.850.000,00 (100,00%)

Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100%.

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer/Printer/AC dan Mesin Tik)

Output kegiatan : Peralatan kantor yang terpelihara selama 12 bulan.

Proporsi realisasi : Rp. 32.990.125,00 dari anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 32.628.0090,00 (98,90%)

Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100%.

3. Program Keluarga Berencana dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 6.270.951.008,00; dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 4.755.112.677,00 atau 75,83%.

Indikator programnya adalah : Prosentase Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 76,29%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

Output kegiatan : Jumlah promosi hak reproduksi individu yang dilakukan.

Proporsi realisasi : Rp. 22.202.200,- dari anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 22.202.200,- (100,00%)

Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100,00%. Artinya dari 12 kali direncanakan yang dilaksanakan sebanyak 12 kali.

b. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana

Output kegiatan : Jumlah kelompok KB MKJP.

Proporsi realisasi : Rp. 139.859.325,00 dari anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 139.607.900,- (99,82%)

Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100,00%. Artinya dari target membentuk kelompok KB MKJP sejumlah 46 kelompok, tahun 2019 telah berhasil membentuk 46 kelompok.

c. Kegiatan Pelayanan KB.

Output kegiatan : Jumlah peserta KB yang terlayani.
Jumlah peserta KB baru

Realisasi anggaran : Rp. 164.408.500,00 dari anggaran APBD sebesar Rp. 174.766.983,00 (94,07%)

Proporsi capaian kedua indikator kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 89,93%.

- Dari 88.638 orang target calon akseptor yang terlayani sejumlah 91.511 orang (103,24%).

- Untuk peserta KB baru, dari target sejumlah 23.120 orang yang menjadi peserta KB baru sejumlah 17.713 orang (76,61%).

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengikutsertakan mitra kerja yaitu ormas, TNI AD, Polri dan instansi terkait.

d. Kegiatan Standarisasi kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR

Output kegiatan : Jumlah tenaga kesehatan pelayanan KBKR yang terstandarisasi/mendapat sertifikat CTU.

Realisasi anggaran : Rp. 66.260.500 dari anggaran APBD sebesar Rp. 66.440.300,00 (99,73%)

Proporsi capaian indikator kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 200,00%.

Dari rencana yang dilatih dan mendapat sertifikat CTU sejumlah 20 orang, terealisasi sejumlah 40 orang bidan yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat CTU dikarenakan adanya tambahan anggaran untuk kegiatan ini.

e. Kegiatan Biaya Operasional KB (BOKB)-(DAK Non Fisik).

Output kegiatan : Pemenuhan kebutuhan biaya operasional program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Realisasi anggaran : Rp. 2.866.231.287,00 dari anggaran APBD sebesar Rp. 4.201.365.000,00 (68,22%)

Proporsi capaian indikator kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100,00%.

Dari kebutuhan biaya operasional program KB baik yang di kantor maupun pada balai KB di 15 kecamatan semuanya dapat terpenuhi.

f. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (DAK Fisik)

Output kegiatan : Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung program kependudukan dan KB.

Realisasi anggaran : Rp. 1.496.402.290,00 dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.666.317.000,00 (89,80%)

Proporsi capaian indikator kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100,00%.

Tahun 2019 telah diadakan 5 paket yaitu balai KB kecamatan Sawahan, BKB Kit, Genre Kit, BKL Kit dan Sarana kerja PPKBD.

4. **Program Pengendalian Penduduk** dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 2.263.555.370,00; proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 2.219.192.000,00 (98,04%).

Indikator programnya adalah : Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi (9,78%) dibandingkan target (10,07%) sebesar 102,97%.

Indikator ini bersifat negatif (progres negatif) karena semakin kecil realisasi maka semakin baik.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

g. Kegiatan Pemberdayaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).

Output kegiatan : Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang mandiri.

Realisasi anggaran : Rp. 1.910.947.000,00 dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.939.436.090,- (98,53%)

Proporsi capaian indikator kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 102,91%.

Dari sejumlah 1.286 orang IMP yang terdiri dari 206 orang PPKBD dan 1.080 orang sub PPKBD, ditargetkan 515 orang bisa menjadi IMP mandiri dan mumpuni, ternyata realisasinya IMP yang mandiri sejumlah 530 orang (102,91%), tetapi 1.286 orang IMP itu semuanya mendapatkan bantuan operasional setiap bulan selama 11 bulan dengan rincian Rp. 150.000,- /org/bulan untuk 206 PPKBD dan Rp. 100.000,-/org/bln untuk 1.080 Sub PPKBD.

h. Kegiatan Pelayanan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Output kegiatan : Jumlah publikasi program melalui media elektronik dan non elektronik.

Realisasi anggaran : Rp. 60.635.000,00 dari anggaran APBD sebesar Rp. 64.779.330,00 (93,60%)

Proporsi capaian indikator kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100%.

Kegiatan ini digunakan untuk publikasi program dan kegiatan baik melalui media elektronik (televisi) maupun non elektronik (media massa, baliho,

benner, leaflet, dll) serta melaksanakan kegiatan yang bersifat advokasi dengan mitra kerja (instansi terkait, lembaga/ormas)

i. Kegiatan Kapasitas Pengendalian Penduduk

Output kegiatan : Jumlah dokumen dan data informasi kependudukan.

Realisasi anggaran : Rp. 225.660.000,00 dari anggaran APBD sebesar Rp. 237.388.350,00,- (95,06%)

Proporsi capaian indikator kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 66,67%. Dari rencana menyusun 3 dokumen, yang bisa tersusun hanya 1 dokumen yaitu grand design kependudukan dan data mikro keluarga.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun dokumen tentang kependudukan dan keluarga berencana serta untuk melaksanakan pendataan dan updating data keluarga guna memperoleh data mikro keluarga di seluruh desa/kelurahan se Kabupaten Madiun.

j. Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kampung KB di Kabupaten Madiun

Output kegiatan : Jumlah kampung KB yang mandiri.

Realisasi anggaran : Rp. 21.950.000,00 dari anggaran APBD sebesar Rp. 21.951.600,00,- (99,99%)

Proporsi capaian indikator kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100,00%.

Tahun 2019 dari 31 kampung KB ditargetkan 3 menjadi kampung KB mandiri semuanya dapat terbentuk

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membentuk sekaligus memfasilitasi kampung KB di Kabupaten Madiun supaya kampung KB dapat terus beraktifitas sesuai tujuan pembentukan yaitu meningkatkan kesertaan ber KB dan kesejahteraan masyarakat.

5. Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja

dengan anggaran sebesar Rp. 286.510.295,00; proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 285.285.200,00 (99,57%).

Indikator programnya adalah : Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 tahun. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi (7,10%) dibandingkan target (7,40%) sebesar **104,23%**.

Indikator ini bersifat negatif (progres negatif) karena semakin kecil realisasinya maka semakin baik.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

k. Kegiatan Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja.

Output kegiatan : Jumlah Kelompok Tri Bina (BKB, BKR dan BKL) dan kelompok PIK Remaja yang aktif.

Realisasi anggaran : Rp. 217.543.000,00 dari anggaran DID sebesar Rp. 218.168.095,- (99,71%)

Proporsi capaian indikator kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100,00%.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengaktifkan dan mengembangkan kelompok tri bina (BKB, BKR dan BKL) yang ada dengan cara pembinaan maupun evaluasi dan melakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) supaya kelompok Tri Bina dan PIK Remaja aktif melaksanakan kegiatan yang mendukung suksesnya program KKBPK. Tahun 2019 ada 1.431 kelompok yang aktif dari target 1.413 kelompok yang diharapkan aktif (100.00%).

l. Kegiatan Pemberdayaan Keluarga.

Output kegiatan : Jumlah kelompok UPPKS yang aktif.

Realisasi anggaran : Rp. 67.742.200,00 dari anggaran APBD sebesar Rp. 68.342.200,- (99,12%)

Proporsi capaian indikator kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100,00%. Pada tahun 2019 dari target 198 kelompok UPPKS yang diharapkan aktif, realisasinya ada 198 kelompok UPPKS yang aktif.

6. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dengan anggaran sebesar Rp. 208.662.775,00; proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 208.133.750,00 (99,75%).

Indikator programnya adalah : Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam bidang ekonomi.

Proporsi capaian program berdasarkan realisasi (51,61%) dibandingkan target (51,66%) sebesar **99,91%**. Artinya, pada tahun 2019 hanya ada 51,61% wanita usia produktif yang bekerja dan mempunyai penghasilan.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

m. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Output kegiatan : Jumlah perempuan yang bekerja.

Realisasi anggaran : Rp. 74.593.750,00 dari anggaran DID sebesar Rp. 75.093.950,- (99,33%).

Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 101,87%.

Tahun 2019 ada 134.726 perempuan yang bekerja dari target 132.250 orang perempuan yang diharapkan bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Kegiatan ini digunakan untuk memfasilitasi kegiatan guna meningkatkan kualitas hidup perempuan seperti fasilitasi peningkatan keluarga mewujudkan kesetaraan gender bagi kelompok ibu rumah tangga, pelatihan pemberdayaan perempuan dibidang politik dan peringatan hari besar yang berkaitan dengan perempuan (hari kartini dan hari ibu).

n. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender

Output kegiatan : Jumlah lembaga berbasis gender yang aktif.

Realisasi anggaran : Rp. 83.540.000,00 dari anggaran DID sebesar Rp. 83.568.825,00 (99,97%)

Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100,00%.

Tahun 2019 ada 66 lembaga berbasis gender yang semuanya aktif.

Kegiatan ini juga digunakan untuk memfasilitasi pencapaian penghargaan dalam hal penganggaran yang responsif gender. Tahun 2019 Kabupaten Madiun telah meraih penghargaan dari kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu Anugerah Parahita Ekapraya/APE kategori "**madya**".

o. Kegiatan Penyusunan Perda PUG

Output kegiatan : Naskah akademik Perda PUG.

Realisasi anggaran : Rp. 50.000.000,00 dari anggaran DID sebesar Rp. 50.000.000,00 (100,00%)

Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100,00%.

Tahun 2019 telah berhasil disusun naskah akademik sebagai syarat untuk dapat disusunnya peraturan daerah (Perda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun Perda PUG dengan tujuan antara lain untuk memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah serta meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan

tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan.

7. **Program Peningkatan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak** dengan anggaran sebesar Rp. 403.139.550,00; proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 399.625.000,00 atau 99,13%.

Indikator programnya adalah : Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi (0,025%) dibandingkan target (0,041%) sebesar **164,00%**. Artinya, pada tahun 2019 hanya ada 0,025 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tiap 1.000 orang perempuan dan anak di Kabupaten Madiun.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- p. *Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak*

Output kegiatan : Jumlah dokumen data gender dan anak.

Realisasi anggaran : Rp. 46.115.000,00 dari anggaran APBD sebesar Rp. 46.115.000,00 (100,00%)

Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100,00%.

Pada tahun 2019 telah berhasil disusun 4 dokumen data gender dan anak yaitu dokumen untuk profil anak, buku saku KLA, dokumen KLA dan APE

- q. *Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak.*

Output kegiatan : Jumlah pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Realisasi anggaran : Rp. 92.785.000,00 dari anggaran APBD sebesar Rp. 92.995.800,00 (99,77%)

Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100,00%.

Kegiatan pencatatan, pendampingan penanganan kasus kekerasan dan penjangkauan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan ini dilaksanakan selama 12 bulan.

- r. *Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak.*

Output kegiatan : Jumlah Forum Anak yang terfasilitasi, Jumlah lembaga layanan anak yang terfasilitasi

Realisasi anggaran : Rp. 113.725.000,00 dari anggaran DID sebesar Rp. 114.028.750,00 (99,73%)

Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100,00%.

Tahun 2019 telah difasilitasi 2 lembaga anak dari targetnya 2 lembaga layanan anak yang akan difasilitasi yaitu Forum Anak tingkat kabupaten. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Pada tahun 2019 Kabupaten Madiun telah meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak dari kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan kategori “**madya**”.

s. Kegiatan Fasilitasi Kecamatan dan Desa Layak Anak.

Output kegiatan : Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang telah menginisiasi terwujudnya Kelana dan Dekela

Realisasi anggaran : Rp. 147.000.000,00 dari anggaran APBD sebesar Rp. 150.000.000,00 (98,00%)

Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100,00%.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak yang antara lain harus terwujudnya kecamatan dan desa layak anak. Tahun 2019 ada 15 kecamatan dan 206 desa/kelurahan yang telah berhasil untuk dapat menginisiasi terwujudnya Kelana (Kecamatan Layak Anak) dan Dekela (Desa/Kelurahan Layak Anak)

Hasil Analisis pencapaian kinerja 7 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP&KB, PP&PA) Kabupaten Madiun pada Tahun 2019 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan sebagian besar terpenuhi. Sedangkan dengan melihat proporsi realisasi anggaran, maka rata-rata penyerapan anggaran tahun 2019 sebesar 84,49%.

Pengukuran kinerja Dinas PPKB, PPPA didasarkan pada sasaran pada Renstra dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Pengukuran Kinerja Utama Dinas PPKB, PPPA Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas	Rata - rata anak yang dilahirkan wanita selama masa reproduksinya (total Fertility Rate/TFR)	2,19	2,23	98,21
	Persentase keluarga sejahtera	83,26	86,97	104,46
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam lembaga pemerintah dan politik	7,07	7,23	102,26
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Program Dinas PPKB, PPPA Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target	Realisasi	Capaian
Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	Program Keluarga Berencana	76,85	76,29	99,27
	Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmet Need	Program Pengendalian Penduduk	10,07	9,78	102,97
	Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 tahun	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	7,40	7,10	104,23
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam ekonomi	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	51,66	51,61	99,91
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Peningkatan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak	0,041	0,025	164,00

Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp. 10.249.035.364,00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp. 8.659.241.888,00

Sedangkan untuk capaian kinerja hasil pelaksanaan Renja tahun 2019 dapat dilihat pada tabel rekapitulasi berikut ini :

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2019

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome/Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th. 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegt. (n-3) Th. 2018	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program & Kegt. (Renja PD Th. n-1) Th. 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Th. Berjalan (2020)	
					Target Renja PD Th. 2019	Realisasi Renja PD Th. 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegt. Th. 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
2.02... . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pengelolaan administrasi umum, keuangan dan perlengkapan	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00	-	-	-
2.02. ..01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Listrik, telepon dan air siap pakai		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	-	-	-
2.02. ..01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	-	-	-
2.02. ..01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	-	-	-
2.02. ..01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	-	-	-
2.02. ..01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	-	-	-
2.02. ..01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan minum harian dan rapat		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	-	-	-
2.02. ..01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan dinas luar daerah		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	-	-	-
2.02. ..01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	-	-	-

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome/Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th. 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegt. (n-3) Th. 2018	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program & Kegt. (Renja PD Th. n-1) Th. 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Th. Berjalan	
					Target Renja PD Th. 2019	Realisasi Renja PD Th. 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegt. Th. 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
2.02. ...01.24	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Tenaga kerja non PNS siap pakai		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	-	-	-
2.02... . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00	-	-	-
2.02. ...02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang terpelihara		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	-	-	-
2.02. ...02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional kantor siap pakai		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	-	-	-
2.02...02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Meubeleur kantor terpelihara		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	-	-	-
2.02...02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor (Komputer, Printer, AC dan Mesin Tik)	Sarana pendukung kantor siap pakai		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	-	-	-
5.2.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	75,00%	-	-	-	-	75,00%	80,00%	106,67
		Nilai SAKIP OPD	A (85,10)	-	-	-	-	A (85,10)	A (83,38)	100,33
5.2.08.01	Pelaksanaan Administrasi, Kepegawaian dan Sarana Prasarana	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan						14 kegt	14 kegt	100,00
		Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi						100,00%	80,00%	80,00

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome/Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th. 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegt. (n-3) Th. 2018	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program & Kegt. (Renja PD Th. n-1) Th. 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Th. Berjalan	
					Target Renja PD Th. 2019	Realisasi Renja PD Th. 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegt. Th. 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
		Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan pelatihan						10 org	21 org	210,00
5.2.08.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku						19 dok	19 dok	100,00
2.08.. 15	Program Keluarga Berencana	Persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif	76,90%	76,35%	76,85%	76,29%	99,27	76,90%	76,90%	100,00
2.08...15.03	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Jumlah promosi hak reproduksi individu yang dilakukan		12 kali	12 kali	12 kali	100,00	12 kali	12 kali	100,00
2.08...15.05	Pembinaan KB	Jumlah kelompok KB MKJP yang aktif		31 kelp	46 kelp	46 kelp	100,00	61 kelp	61 kelp	100,00
2.08...15.08	Pelayanan KB	- Jumlah peserta KB Baru		23.275 org	23.120 org	18.739 org	81,05	23.220 org	23.220 org	100,00
		- Jumlah calon akseptor terlayani			88.638 org	91.511 org	103,24	88.700 org	88.700 org	100,00
2.08...15.16	Biaya Operasional KB (BOKB) (DAK Non Fisik)	Pemenuhan kebutuhan biaya operasional program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)		14 balai KB	15 balai KB	15 balai KB	100,00	15 balai KB	15 balai KB	100,00

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome/Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th. 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegt. (n-3) Th. 2018	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program & Kegt. (Renja PD Th. n-1) Th. 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Th. Berjalan	
					Target Renja PD Th. 2019	Realisasi Renja PD Th. 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegt. Th. 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
2.08...15.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Kependudukan dan KB (DAK Fisik)	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung program kependudukan dan KB		3 paket	5 paket	5 paket	100,00%	4 paket	4 paket	100,00
2.08...15.17	Standarisasi Kapasitas Tenaga Kesehatan KKB dan Kespro (KBKR)	Jumlah tenaga kesehatan pelayanan KBKR yang terstandarisasi/ mendapat sertifikat CTU		60 org	20 org	40 org	200,00%	20 org	20 org	100,00
2.08... . 25	Program Pengendalian Penduduk	Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need	9,87%	10,07%	10,07%	9,78%	102,97	9,87%	9,87%	100,00
2.08...25.09	Pemberdayaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	Jumlah kader IMP yang mandiri		-	515 org	530 org	102,91%	643 org	643 org	100,00
2.08...25.10	Pelayanan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah publikasi program melalui media elektronik dan non elektronik		3 paket	3 paket	3 paket	100,00%	3 paket	3 paket	100,00
2.08...25.22	Peningkatan Kapasitas Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen dan data informasi kependudukan		1 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	33,33%	2 dokumen	2 dokumen	100,00
2.08...25.23	Fasilitasi Pembentukan Kampung KB di Kabupaten Madiun	Jumlah kampung KB yang mandiri		16 desa	31 desa	31 desa	100,00%	31 desa	31 desa	100,00
2.08... . 26	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 tahun	7,25%	7,40%	7,40%	7,10%	104,23	7,25%	7,25%	100,00
2.08...26.12	Pemberdayaan Keluarga	Jumlah kelompok UPPKS yang aktif		196 kelp	198 kelp	198 kelp	100,00	200 kelp	200 kelp	100,00
2.08...26.22	Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah Kader Tri Bina dan kelompok PIK Remaja yang aktif		1.431 kelp	1.431 kelp	1.431 kelp	100,00	1.440 kelp	1.440 kelp	100,00

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome/Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th. 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegt. (n-3) Th. 2018	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program & Kegt. (Renja PD Th. n-1) Th. 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Th. Berjalan	
					Target Renja PD Th. 2019	Realisasi Renja PD Th. 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegt. Th. 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
2.02... . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam bidang ekonomi	51,70%	51,66%	51,66%	51,61%	99,91	51,70%	51,70%	100,00
2.02...17.11	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan		4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100,00	-	-	-
2.02..17.12	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah advokasi dan fasilitasi pencegahan, penanganan dan pendampingan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak		4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100,00	-	-	-
5.2.20.01	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Jumlah perempuan yang bekerja		-	-	-	-	132.500 org	132.500 org	100,00
5.2.20.02	Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender	Jumlah lembaga berbasis gender yang aktif		-	-	-	-	67 lembaga	67 lembaga	100,00
2.02... . 19	Program Penguatan Kelembagaan Pengarus-utamaan Gender Dan Anak	Persentase Perempuan Yang Mempunyai Penghasilan	-	51,65%	51,65%	51,95%	100,58	-	-	-
2.02...19.02	Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender	Jumlah pembinaan program pemberdayaan perempuan		15 kali	15 kali	15 kali	100,00	-	-	-
2.02...19.03	Sosialisasi dan Advokasi Kabupaten Madiun Layak Anak	Jumlah fasilitasi dan advokasi KLA		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00	-	-	-
5.2.21	Program Peningkatan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	0,040	0,040	0,041	0,025	164,00	0,040	0,040	100,00
5.2.21.03	Penyediaan Data Gender dan Anak	Jumlah dokumen data gender dan anak		-	4 dokumen	4 dokumen	100,00	4 dokumen	4 dokumen	100,00

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome/Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th. 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegt. (n-3) Th. 2018	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program & Kegt. (Renja PD Th. n-1) Th. 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Th. Berjalan	
					Target Renja PD Th. 2019	Realisasi Renja PD Th. 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegt. Th. 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
5.2.21.12	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan Anak	Jumlah pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		-	12 bln	12 bln	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
5.2.21.13	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Forum Anak dan lembaga layanan anak yang terfasilitasi		-	2 lembaga	2 lembaga	100,00	2 lembaga	2 lembaga	100,00
5.2.21.	Fasilitasi Kecamatan dan Desa Layak Anak	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang telah menginisiasi terwujudnya Kelana dan Dekela		-	15 kec, 206 ds/kel	15 kec, 206 ds/kel	100,00	-	-	-

Penjelasan dari tabel 2.3 adalah sebagai berikut :

I. Program/kegiatan di tahun 2019 yang *tidak* memenuhi target adalah :

1. Program Keluarga Berencana (99,27%)

Realisasi capaian program berada dibawah target dikarenakan persentase PUS yang menjadi peserta KB lebih kecil dari target Hal ini disebabkan oleh adanya perbaikan data mulai tahun 2017 dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga sehingga data peserta KB Aktif yang sudah tidak termasuk usia PUS secara otomatis dihapus dari data peserta KB aktif.

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (99,91%)

Dari 51,66% perempuan yang diharapkan dapat bekerja dan meningkatkan pendapatan keluarga, ternyata kenyataannya hanya 51,61% saja perempuan yang bekerja.

Meskipun secara persentase perempuan yang berpartisipasi dalam bidang ekonomi turun akan tetapi secara kuantitas meningkat dari jumlah perempuan bekerja sebanyak 132.100 pada tahun 2018 meningkat menjadi 134.726 pada tahun 2019

II. Program/kegiatan di tahun 2019 yang telah *memenuhi/melebihi* target adalah :

1. Program Pengendalian Penduduk (102,97%)

Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need (Ingin Anak tapi Ditunda/IAT dan Tidak Ingin Anak Lagi/TIAL) sebagai hasil dari advokasi dan publikasi program yang gencar dilaksanakan baik pada pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat.

Target program ini bersifat progres negatif, artinya semakin kecil realisasi daripada target maka hasilnya semakin baik.

2. Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja (104,23%)

Realisasi persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 tahun lebih kecil dari target sebagai hasil dari advokasi dan publikasi program yang gencar dilaksanakan baik pada pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat.

Target program ini bersifat progres negatif, artinya semakin kecil realisasi daripada target maka hasilnya semakin baik.

3. Program Peningkatan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak (164,00%)

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2019 menurun dikarenakan adanya pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan hak, perlindungan perempuan dan anak secara optimal dan sesuai dengan yang telah direncanakan

1.6. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas PP&KB, PP&PA Kabupaten Madiun merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan urusan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 14, ayat (1), huruf p. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dari 3 (tiga) urusan sesuai dengan pasal 15, ayat 3, 4 dan 5 Dinas PP dan KB, PP dan PA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 2 (dua) urusan pemerintahan wajib non dasar yang harus dilaksanakan, yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PP dan KB, PP dan PA Kabupaten Madiun yang diperbarui dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan antar OPD dengan mitra kerja, antar Kabupaten/Kota dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat.

Untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah, Dinas PP&KB, PP&PA Kabupaten Madiun melaksanakan program kerja 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam *core strategy* dan *core policy* yang diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas PP&KB, PP&PA Kabupaten Madiun merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika

implementasi program tersebut sesuai dengan misi yang diemban, sehingga adanya keterkaitan antara program Dinas PP&KB, PP&PA dengan program pemerintah Kabupaten Madiun menjadi mutlak.

Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas pelaksanaan program kependudukan, KB dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Madiun mengalami peningkatan. Beberapa hal yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas tersebut meliputi :

1. Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap program dan kegiatan dengan disosialisasikannya melalui kegiatan advokasi.
3. Meningkatnya keikutsertaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam pelaksanaan semua program kependudukan, KB dengan meningkatnya jumlah peserta KB modern dan tersedianya dokumen data mikro keluarga tingkat desa sebagai hasil dari pendataan keluarga.
4. Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan serta monitoring pelaksanaan pembangunan sebagai bahan untuk perencanaan selanjutnya.

Berikut ini tabel penjelasan mengenai pencapaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama :

Tabel 2.4

Pencapaian Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2018 s.d 2023
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SPM	IKK	Target Renstra						Realisasi Capaian						Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian jumlah penduduk, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak Indikator Tujuan : Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)																
1.	Rata-rata Anak Yang Dilahirkan Wanita Selama Masa Reproduksi (Total Fertility Rate / TFR)	-	Ada	2,19	2,19	2,19	2,17	2,17	2,15	2,23	2,17	-	-	-	-	
2.	Persentase keluarga sejahtera	-	-	83,26	83,26	83,35	83,35	83,85	83,85	86,97	83,64	-	-	-	-	
Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak																
Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian jumlah penduduk, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak Indikator Tujuan : Indek Pembangunan Gender (IPG)																
3.	Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam lembaga pemerintah dan politik	-	Ada	7,07	7,07	7,12	7,15	7,17	7,20	7,23	9,46	-	-	-	-	
4.	Persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	

1.7. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Ada beberapa cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas PP&KB, PP&PA Kabupaten Madiun memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijakan, rangkaian program dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Dinas PP&KB, PP&PA Kabupaten Madiun.

Kebijaksanaan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan dengan mendasarkan diri pada RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Dinas PP&KB, PP&PA Kabupaten Madiun dirumuskan melalui Renstra OPD tahun 2018-2023 yang tidak terlepas dari RPJMD Kabupaten Madiun.

Ada beberapa tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PP dan KB, PP dan PA sebagai berikut :

A. Tantangan yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Masih tingginya pernikahan dengan usia istri dibawah 20 tahun 7,10% sedangkan target nasional sebesar 3%
2. Masih tingginya Unmet Need yaitu 9,78% dari target nasional sebesar 5%
3. Masih rendahnya kesadaran PUS dalam pemasangan KB Pria khususnya MOP yaitu 4,53% dari jumlah peserta KB pria.
4. Masih rendahnya pemakaian kontrasepsi MKJP yaitu 34,01% dari seluruh peserta KB aktif.
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat khususnya remaja diluar sekolah dan pesantren untuk membentuk PIK-R di tingkat desa/kelurahan.
6. Kader program dilapangan selalu merangkap dengan program lintas sektor lainnya.
7. Masih rendahnya kompetensi SDM di OPD dalam hal IT.

B. Tantangan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belum optimalnya peran serta dan dukungan dari Masyarakat, Organisasi Profesi, Asosiasi dan Lembaga Swasta.

2. Masih rendahnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di daerah termasuk Pusat Studi Wanita/Gender dan lembaga-lembaga peneliti, pemerhati serta pemberdayaan perempuan dan anak.
3. Adanya tuntutan masyarakat terhadap kemudahan akses pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
4. Belum aktifnya Forum Anak ditingkat Kecamatan dan desa/kelurahan
5. Terbatasnya Tenaga Pendampingan bagi korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
6. Perlu adanya shelter untuk pelayanan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH).
7. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual, penipuan dan dekadensi moral di masyarakat.
8. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD yaitu :

1. Belum mempunyai sarana prasarana pendukung (shelter/gedung dan kendaraan) khusus untuk melayani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk mengatasi masalah ini, maka perlu dibentuk pojok konsultasi di tingkat desa dan tingkat kecamatan yang bertempat di kantor kecamatan/balai penyuluh KB serta dibentuk P2TP2A ditingkat kabupaten yang bertempat di Dinas PPKB dan PPPA.
2. Adanya anggapan masyarakat bahwa alkon non MKJP lebih praktis, untuk merubah anggapan ini maka harus didukung adanya KIE yang lebih mantap melalui Kontap (kontrasepsi mantap) dari petugas KB dan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan pelayanan KBKR.
3. Permasalahan kependudukan dalam konteks Keluarga Berencana seharusnya menjadi permasalahan prioritas untuk menjadikan perencanaan pembangunan berbasis kependudukan. Untuk mengatasi masalah ini, maka harus dilaksanakan advokasi yang lebih mantap pada para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan yang didukung dengan data mikro kependudukan
4. Untuk mempersiapkan anak menghadapi perkembangan teknologi yang berakibat timbulnya kasus anak-anak yang semakin mengawatirkan,

seperti kenakalan remaja, kekerasan seksual remaja, akses pornografi, perbuatan amoral remaja, serta penggunaan narkoba maka perlu adanya pendampingan dari orangtua. Untuk inilah diperlukan ketahanan keluarga yaitu “kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga (Walsh, 1996).”

Adapun strategi dan kebijakan Dinas PP&KB, PP&PA Kabupaten Madiun untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. **Peningkatan akses dan pelayanan KB** dengan kebijakan :
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang dan jangka pendek
 - b. Peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja dalam rangka pendewasaan usia perkawinan
 - c. Penguatan kelembagaan serta data dan informasi kependudukan dan KB
 - d. Penguatan jejaring dalam upaya peningkatan pelayanan Keluarga Berencana
 - e. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KB
2. **Penguatan kapasitas kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)** melalui kebijakan :
 - a. Penguatan regulasi, strategi advokasi - KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi
 - b. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan
 - c. Peningkatan kapasitas Kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga
 - d. Meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja
3. **Peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga** dengan kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga
 - b. Penguatan kebijakan usia perkawinan
 - c. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga
 - d. Meningkatkan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi
 - e. Penguatan dan pengembangan kerjasama dengan mitra kerja
4. **Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan** dengan kebijakan sebagai berikut :
 - a. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif gender (PPRG) kepada OPD atau lembaga pemerintah

- b. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender
 - c. Pemberdayaan ekonomi perempuan
 - d. Penguatan lembaga jejaring Pengarus Utamaan Gender (PUG)
 - e. Pembentukan regulasi perpektif gender
5. **Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak** dengan kebijakan sebagai berikut :
- a. Penguatan regulasi peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
 - b. Meningkatkan kualitas layanan perlindungan khusus anak dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - c. Penguatan jejaring pencegahan dan penanganan kasus kekerasan
 - d. Percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak

Dalam perkembangan kedepan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki Dinas PP&KB, PP&PA diharapkan lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menyelesaikan semua tantangan dan permasalahan. Untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas dengan mengedepankan pendekatan sosial partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas dan komitmen SDM, memantapkan kelembagaan dan institusi masyarakat ditingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

1.8. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2021, memuat program dan kegiatan seluruh PD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Program dan kegiatan prioritas ini baru rancangan awal, dan masing-masing PD masih dimungkinkan untuk mengusulkan program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masing-masing PD, yang selanjutnya diusulkan sehingga termuat dalam RKPD definitif (yang ditetapkan Bupati).

Demikian halnya program dan kegiatan pada Dinas PP&KB, PP&PA Kabupaten Madiun, program dan kegiatan prioritas tahun 2021 yang telah masuk dalam matrik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2021 tetapi belum sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga perlu disempurnakan melalui usulan pada Renstra PD dan RPJMD tahun 2018-2023. Selanjutnya program dan kegiatan Dinas PP&KB, PP&PA yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Madiun ini dijadikan dasar dalam penyusunan KUA PPAS dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021.

Prioritas Program pada Dinas PP&KB, PP&PA lebih disempurnakan lagi karena sangat mendukung capaian target dan sasaran RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 khususnya prioritas pembangunan

kesehatan. Capaian kinerja yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan prioritas program pembangunan tahun 2021 pada Dinas PP&KB, PP&PA adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rancangan Awal RENJA Dinas PP&KB, PP&PA Kabupaten Madiun Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran 2021	Program
1.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian jumlah penduduk, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	1. Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas	1. Rata - rata anak yang dilahirkan wanita selama masa reproduksinya (total Fertility Rate/TFR)	2,17	1. Program Pembinaan Keluarga Berencana 2. Program Pengendalian Penduduk
			2. Persentase keluarga sejahtera	83,35	3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		2. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	3. Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dan politik	7,15	4. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		3. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	4. Persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	100,00	5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
					6. Program Perlindungan Khusus Anak
					7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Sedangkan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPД Kabupaten Madiun tahun 2021 terhadap analisa kebutuhan PD secara keseluruhan yang telah disesuaikan dengan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Madiun
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
I.	Program Keluarga Berencana		Persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif	76,85%	6.260.951.008	Program Pembinaan Keluarga Berencana		Persentase Pasangan Usia Subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need	9,67	8.072.202.400	
1.	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	DPPKB, P3A	Jumlah promosi hak reproduksi individu yang dilakukan	12 kali	22.202.400	<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	DPPKB, P3A	<i>Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK melalui advokasi dan KIE</i>	53,51	1.338.390.400	
2.	Pembinaan KB	15 kecamatan	Jumlah kelompok KB MKJP yang terbentuk	46 kelp	139.859.325	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	15 kecamatan	Jumlah publikasi program KKBPK melalui media elektronik dan non elektronik	5 paket	75.924.400	
3.	Pelayanan KB	15 kecamatan	Jumlah peserta KB Baru	23.120 org	151.961.983	Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai Penyuluhan KKBPK	15 kecamatan	Persentase Kegiatan Operasional Balai Penyuluhan KB di Kecamatan berjalan lancar	100,00%	1.101.240.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
						Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK		Persentase ketersediaan dukungan manajemen dan KIE Program KKBPK untuk kegiatan BOKB	100,00%	161.226.000	
						<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>		<i>Jumlah kader IMP yang mandiri</i>	<i>225 org</i>	<i>2.659.080.000</i>	
						Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		Jumlah kader IMP yang difasilitasi	1.101 org	1.670.280.000	
						Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Persentase Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang aktif	100,00%	988.800.000	
						<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Persentase Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sesuai standar</i>	<i>93,33%</i>	<i>3.108.245.960</i>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
						Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Persentase Fasilitas Kesehatan, Jaringan dan Jejaringnya yang mendapatkan distribusi Alat dan obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	100,00%	65.884.000	
						Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Persentase PA MKJP	34,50	1.486.750.000	
						Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	4	10.979.355	
						Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Persentase Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100,00%	1.226.138.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
						Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Persentase fasilitas kesehatan yang mendapatkan pembinaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	100,00	9.473.960	
						Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak - hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan		Jumlah Faskes yang mampu memberikan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak - hak Reproduksi	28 faskes	50.000.000	
								Jumlah Kecamatan dengan PKB/PLKB yang mampu memberikan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak - hak Reproduksi di Kelompok Kegiatan	15 kec		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
						Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		Persentase Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sesuai standar	60%	50.000.000	
						Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		Persentase ketersediaan dukungan operasional Pelayanan KB Bergerak	100,00%	139.020.645	
						Promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran		Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	32,00%	70.000.000	
						<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan berKB</i>		<i>Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi masyarakat) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK</i>	35	966.486.040	
						Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase Komitmen dan peran serta stakeholders /mitra kerja yang mendukung operasional Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	37,6%	65.526.040	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
						Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Jumlah Rumah data kependudukan paripurna di kampung KB percontohan	2	140.400.000	
						Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB		Persentase Kampung KB Aktif	100,00%	760.560.000	
						Program Pengendalian Penduduk		Persentase dokumen data informasi kependudukan yang tersusun		135.331.600	
						<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota</i>		<i>Jumlah dokumen data informasi kependudukan yang tersusun</i>	<i>3 dok</i>	<i>135.331.600</i>	
						Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan		Jumlah dokumen data mikro keluarga tingkat Desa/Kelurahan		135.331.600	
						Penyediaan data dan informasi keluarga		Jumlah dokumen data mikro keluarga		-	
						Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Presentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 Tahun	7,10%	1.112.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
						<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>		<i>Presentase kelompok UPPKS yang aktif</i>	40,00%	962.400.000	
						Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Persentase sarana kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diadakan sesuai rencana	100,00%	280.000.000	
						Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS dan PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah kelp. UPPKS yang aktif	188 kelp	75.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
						Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Persentase biaya operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang disediakan	100,00%	607.400.000	
						<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga</i>		<i>Persentase Kader tribina yang aktif</i>	50,00%	150.000.000	
								<i>Persentase kelompok PIK-Remaja yang aktif</i>	45,00%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
						Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS dan PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah kader Tribina yang aktif	1.590	150.000.000	
						Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif	79,52	165.000.000	
						<i>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten Kota</i>		<i>Persentase focal point PD yg aktif</i>	<i>64,44</i>	<i>75.000.000</i>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Persentase Perangkat daerah yang melaksanakan ARG	29	75.000.000	
						<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota</i>		<i>Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif</i>	66	90.000.000	
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota		Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang berkompeten	250	90.000.000	
						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang aktif	30,00	100.000.000	
						<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota</i>		<i>Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang aktif</i>	90	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
						Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat Daerah Kab/Kota		Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang terfasilitasi	100	100.000.000	
						Program Perlindungan Khusus Anak		Rasio kekerasan terhadap anak	15,00	135.331.600	
						<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kab/Kota</i>		<i>Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terlayani</i>	<i>100,00</i>	<i>135.331.600</i>	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota		Pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam satu tahun	12 kasus	135.331.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
VI.	Program Pelayanan Kesekretariatan		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80,00 %	971.634.200	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80,00	4.623.759.208	
			Nilai SAKIP OPD	85,20				Nilai SAKIP OPD	85,20		
15.	Pelaksanaan Administrasi, Kepegawaian dan Sarana Prasarana	DPPKB, P3A	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	14 layanan	963.634.200	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>DPPKB, P3A</i>	<i>Gaji dan tunjangan ASN diterimakan</i>	14 bln	3.783.028.588	
			Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	100,00 %		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan tunjangan ASN diterimakan	14 bln	3.783.028.588	
			Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan pelatihan	10 org		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>DPPKB, P3A</i>	<i>Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan</i>	14 layanan	839.230.620	
								<i>Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi</i>	100,00 %		
								<i>Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan pelatihan</i>	10 org		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
						Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik		Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	14 layanan	839.230.620	
								Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	100,00%		
								Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan pelatihan	10 org		
16.	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran	DPPKB, P3A	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	18	8.000.000	<i>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku</i>	18	1.500.000	
						Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	18	1.500.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun, merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang hanya diinginkan oleh perangkat daerah. Untuk itu kualitas dan sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB, PPPA) merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari tingkat Desa hingga tingkat Kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan. Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja Bupati Madiun dalam proses kegiatan Musrenbang dan Bhakti Sosial terpadu (BST) dan selanjutnya dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan rencana kerja Dinas PPKB, PPPA didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah Kabupaten secara :

- a. Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara

- b. Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah
- c. Efisien yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.
- d. Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
- e. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- f. Partisipatif, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- g. Terukur, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
- h. Berkeadilan, merupakan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- i. Berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- j. Berkelanjutan yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Pada forum OPD ada beberapa usulan kegiatan yang ditujukan kepada Dinas PPKB, PPPA dari kelompok masyarakat. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat permohonan terhadap pelaksanaan kegiatan dan bantuan sarana prasarana yang direncanakan. Dari beberapa usulan masyarakat tidak semuanya dapat disetujui oleh OPD dengan alasan :

- a. Jika permohonan itu sumber dananya adalah DAK maka pelaksanaannya harus sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) yang keluaranya setelah pelaksanaan musrenbang.
- b. Jika bantuan yang diajukan ternyata tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PPKB dan PPPA, maka akan dialihkan pada OPD yang menangani.

Secara terinci usulan program dan kegiatan untuk tahun 2020 dari pemangku kepentingan dan masyarakat adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Usulan	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja, Pemberdayaan Keluarga	Ds. Sidorejo, Kebonsari	Pembinaan pada kader dan kelompok UPPKS	1 kelompok	Dilaksanakan sebagai kegiatan rutin dengan sasaran kelompok perwakilan tiap kecamatan
2.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja, Pemberdayaan Keluarga	Ds. Balerejo, Kebonsari	Pembinaan pada kader dan kelompok UPPKS	1 kegiatan	
3.	Program Keluarga Berencana, Pelayanan KB	Ds. Bacem, Kebonsari	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	1 paket	
4.	Program Keluarga Berencana, Pelayanan KB	Ds. Blimbing, Dolopo	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	0	
5.	Program Peningkatan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak, Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan Anak	Ds. Klorogan, Geger	Sosialisasi tentang Pojok Konsultasi tingkat Kecamatan dan Desa	1 paket	Hanya sebagai narasumber
6.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Sangen, Geger	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	50 orang	
7.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Sumberbening Balerejo	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	1 kegiatan	Menunggu juknis DAK th. 2020
8.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Bajulan, Saradan	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	1 kegiatan	Menunggu juknis DAK th. 2020
9.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Muneng Pilangkenceng	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	1 paket	menunggu juknis DAK th. 2020
10.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan	Ds. Muneng Pilangkenceng	Pelatihan Pendidik/Konsel or Sebaya pada pengurus dan	1 unit	

	Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja		Anggota PIK Remaja		
11.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Muneng Pilangkenceng	Sosialisasi program PIK Remaja	1 paket	
12.	Program Peningkatan Keluarga dan Remaja Kualitas Ketahanan Pemberdayaan Keluarga	Ds. Muneng Pilangkenceng	Pembinaan pada kader dan kelompok UPPKS	1 paket	
13.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Pemberdayaan Keluarga	Ds. Muneng Pilangkenceng	Pelatihan pada Kader dan kelompok UPPKS	1 paket	
14.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Muneng Pilangkenceng	Pelatihan Kader Tribina	1 paket	
15.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Pulerejo Pilangkenceng	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	1 paket	
16.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Kedungrejo Pilangkenceng	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	0	
17.	Program Pengendalian Penduduk Pelayanan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Ds. Kedungrejo Pilangkenceng	Pemutaran film tentang informasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBBPK)	0	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Usulan	Besaran/ Volume	Catatan
18.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Kedungrejo Pilangkenceng	Pelatihan Kader Tribina	0	
19.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Wonoayu Pilangkenceng	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	0	
20.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds/Kec. Pilangkenceng	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	0	
21.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Sumbergandu Pilangkenceng	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	0	
22.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Pemberdayaan Keluarga	Ds. Sumbergandu Pilangkenceng	Pembinaan pada kader dan kelompok UPPKS	0	
23.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Pemberdayaan Keluarga	Ds. Sumbergandu Pilangkenceng	Pelatihan pada Kader dan kelompok UPPKS	0	
24.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Kedungmaron Pilangkenceng	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	0	
25.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Kedungmaron Pilangkenceng	Sosialisasi program PIK Remaja	0	
26.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Duren Pilangkenceng	Pembinaan pada kader dan kelompok tribina kecamatan	0	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Usulan	Besaran/ Volume	Catatan
27.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Kenongorejo Pilangkenceng	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	0	
28.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Kenongorejo Pilangkenceng	Pembinaan pada kader dan kelompok tribina kecamatan	1 kegiatan	
29.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Pemberdayaan Keluarga	Ds. Kenongorejo Pilangkenceng	Pembinaan pada kader dan kelompok UPPKS	0	
30.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Pemberdayaan Keluarga	Ds. Kenongorejo Pilangkenceng	Pelatihan pada Kader dan kelompok UPPKS	0	
31.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Ds. Kenongorejo Pilangkenceng	Penyuluhan pemberdayaan perempuan bidang politik, ekonomi dan sosial budaya	0	
32.	Program Peningkatan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan Anak	Ds. Kenongorejo Pilangkenceng	Sosialisasi tentang Pojok Konsultasi tingkat Kecamatan dan Desa	0	
33.	Program Peningkatan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Ds. Kenongorejo Pilangkenceng	Sosialisasi tentang Kabupaten Layak Anak pada Forum Anak Desa	0	
34.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Ngengor Pilangkenceng	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	0	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Usulan	Besaran/ Volume	Catatan
35.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Pemberdayaan Keluarga	Ds. Ngengor Pilangkenceng	Pembinaan pada kader dan kelompok UPPKS	0	
36.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Gandul Pilangkenceng	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	0	
37.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Pemberdayaan Keluarga	Ds. Gandul Pilangkenceng	Pembinaan pada kader dan kelompok UPPKS	0	
38.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Luworo Pilangkenceng	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	1 paket	
39.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Luworo Pilangkenceng	Pelatihan Kader Tribina	1 paket	
40.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Pemberdayaan Keluarga	Ds. Luworo Pilangkenceng	Pelatihan pada Kader dan kelompok UPPKS	0	
41.	Program Peningkatan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan Anak	Ds. Luworo Pilangkenceng	Sosialisasi tentang Pojok Konsultasi tingkat Kecamatan dan Desa	0	
42.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Luworo Pilangkenceng	Pelatihan Pendidik/Konse lor Sebaya pada pengurus dan Anggota PIK Remaja	0	
43.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Kreet Pilangkenceng	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	0	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Usulan	Besaran/ Volume	Catatan
44.	Program Pengendalian Penduduk Pelayanan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Ds. Kreet Pilangkenceng	Pemutaran film tentang informasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBBPK)	0	
45.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Kreet Pilangkenceng	Pembinaan pada kader dan kelompok tribina kecamatan	1 paket	
46.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Kreet Pilangkenceng	Pelatihan Kader Tribina	1 paket	
47.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Kreet Pilangkenceng	Sosialisasi program PIK Remaja	1 paket	
48.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Kreet Pilangkenceng	Pelatihan Pendidik/Konselor Sebaya pada pengurus dan Anggota PIK Remaja	1 paket	
49.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Pemberdayaan Keluarga	Ds. Kreet Pilangkenceng	Pembinaan pada kader dan kelompok UPPKS	1 paket	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Usulan	Besaran/Volume	Catatan
50.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Pemberdayaan Keluarga	Krebet Pilangkenceng	Pelatihan pada Kader dan kelompok UPPKS	1 paket	
51.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Ngale Pilangkenceng	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	1 paket	
52.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Ngale Pilangkenceng	Pelatihan Kader Tribina	1 paket	
53.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Ngale Pilangkenceng	Sosialisasi program PIK Remaja	1 paket	
54.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Ngale Pilangkenceng	Pelatihan Pendidik/Konselor Sebaya pada pengurus dan Anggota PIK Remaja	1 paket	
55.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Pemberdayaan Keluarga	Ds. Ngale Pilangkenceng	Pelatihan pada Kader dan kelompok UPPKS	1 paket	
56.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Ngale Pilangkenceng	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	1 paket	
57.	Program Peningkatan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Ds. Ngale Pilangkenceng	Sosialisasi tentang Kabupaten Layak Anak pada Forum Anak Desa	1 paket	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dana anak selama 5 (lima) tahun ke depan berlandaskan pada RPJMN yang merupakan penjabaran Visi, Program Aksi Presiden dan Wakil Presiden yang berpedoman pada RPJPN 2005-2025. Visi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi tersebut dijabarkan menjadi 9 (sembilan) Misi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Mengembangkan Sistem Jaringan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak
- Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan
- Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan
- Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- Menumbuhkan Kewirausahaan
- Memperkuat Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing

- Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila
- Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur
- Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0
- Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru
- Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal
- Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan

3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan

- Redistribusi Aset Demi Pembangunan Berkeadilan
- Mengembangkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Koperasi
- Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan
- Mengembangkan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial
- Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan Di pedesaan
- Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga

- Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah Untuk Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah
- 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**
 - Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi
 - Mitigasi Perubahan Iklim
 - Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup
 - 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa**
 - Pembinaan Ideologi Pancasila
 - Revitalisasi Revolusi Mental
 - Restorasi Toleransi dan Kerukunan Sosial
 - Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya
 - Meningkatkan Kepeloporan Pemuda dalam Pemajuan Kebudayaan
 - Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportifitas dan Berprestasi
 - 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya**
 - Melanjutkan Penataan Regulasi
 - Melanjutkan Rerfomasi Sistem dan Proses Penegakan Hukum
 - Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM
 - Mengembangkan Budaya Sadar Hukum
 - 7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga**
 - Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif
 - Melanjutkan Transformasi Sistem Pertahanan yang Modern dan TNI yang Profesional
 - Melanjutkan Reformasi Keamanan dan Intelejen Yang Profesional dan Terpercaya
 - 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya**
 - Aktualisasi Demokrasi Pancasila
 - Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional
 - Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Birokrasi
 - Reformasi Kelembagaan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien
 - Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Reformasi Pelayanan Publik
 - 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan**
 - Menata Hubungan Pusat Dan Daerah Yang Lebih Sinergis
 - Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah

- Mengembangkan Kerjasama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru

Sesuai dengan penjabaran misi Presiden di atas, Dinas PPKB, PPPA menyukseskan dua dari sembilan misi yaitu misi pertama (**Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**) dan misi ketiga (**Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan**) yang dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa masalah kependudukan dan keluarga berencana merupakan persoalan yang wajib dikerjakan bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Penyusunan perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP&KB, PP&PA) selain melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB), pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak juga berupaya untuk meningkatkan pembangunan manusia.

Pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun, merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat melalui Musrenbang, sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik.

Setiap daerah harus mampu menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ayat (2) Pasal 2, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu setiap Kabupaten/Kota harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 setiap OPD juga diwajibkan untuk membuat dan memiliki Renja OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangatlah penting untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

2.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Madiun, Dinas PP&KB, PP&PA Kabupaten Madiun mengemban amanah untuk mensukseskan misi 4 yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Yang Berkeadilan”, untuk itu dirumuskan tujuan dan sasaran PD yang tertuang dalam Renstra 2018-2023 sebagai berikut :

- Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian jumlah penduduk, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak
- Sasaran : 1. Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas
2. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
3. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

2.3. Program dan Kegiatan Dinas PP&KB, PP&PA Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Dinas PP&KB, PP&PA Kabupaten Madiun akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

I. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten Kota
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota

II. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota
 - a. Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat Daerah Kab/Kota

III. Program Perlindungan Khusus Anak

4. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kab/Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota

IV. Program Pengendalian Penduduk

5. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan data dan informasi keluarga

V. Program Pembinaan Keluarga Berencana

6. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - a. Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai Penyuluhan KKBPK
7. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
 - b. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
8. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - c. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - e. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - f. Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak - hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
 - g. Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - h. Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
 - i. Sub Kegiatan Promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran
 - j. Sub Kegiatan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
9. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan berKB
- a. Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

VI. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

10. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - b. Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS dan PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)

11. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga
 - a. Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS dan PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Sedangkan program dan kegiatan yang juga menjadi rencana kerja tahun 2021, namun hanya sebagai pendukung kegiatan teknis adalah sebagai berikut :

VII. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

12. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
13. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik

Secara rinci tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021 sesuai dengan Renstra 2018-2023 yang disinkronkan dengan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan Dinas PPKB, PPPA Tahun 2021

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian jumlah penduduk, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas	1. Rata - rata anak yang dilahirkan wanita selama masa reproduksinya (total Fertility Rate/TFR)	Program Pengendalian Penduduk	Persentase dokumen data informasi kependudukan yang tersusun
				<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen data informasi kependudukan yang tersusun</i>
				Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah dokumen data mikro keluarga tingkat Desa/Kelurahan
				Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen data mikro keluarga
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need
				<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	<i>Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPk melalui advokasi dan KIE</i>
				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPk sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah publikasi program KKBPk melalui media elektronik dan non elektronik
				Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPk	Persentase ketersediaan dukungan manajemen dan KIE Program KKBPk untuk kegiatan BOKB

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Persentase Kegiatan Operasional Balai Penyuluhan KB di Kecamatan berjalan lancar
				<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>	<i>Jumlah kader IMP yang mandiri</i>
				Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah kader IMP yang difasilitasi
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang aktif
				<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sesuai standar</i>
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Fasilitas Kesehatan, Jaringan dan Jejaringnya yang mendapatkan distribusi Alat dan obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase PA MKJP

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)
				Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase fasilitas kesehatan yang mendapatkan pembinaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
				Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	1. Jumlah Faskes yang mampu memberikan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak - hak Reproduksi 2. Jumlah Kecamatan dengan PKB/PLKB yang mampu memberikan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak - hak Reproduksi di Kelompok Kegiatan
				Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sesuai standar

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)
				Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Persentase ketersediaan dukungan operasional Pelayanan KB Bergerak
				Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan
				<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	<i>Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK</i>
				Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Komitmen dan peran serta stakeholders /mitra kerja yang mendukung operasional Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
				Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Rumah data kependudukan paripurna di kampung KB percontohan
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Persentase Kampung KB Aktif
			2. Persentase keluarga sejahtera	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 Tahun
				<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Persentase kelompok UPPKS yang aktif</i>

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase sarana kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diadakan sesuai rencana
				Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok UPPKS yang aktif
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase biaya operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang disediakan
				<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<ol style="list-style-type: none"> <i>Persentase Kader tribina yang aktif</i> <i>Persentase kelompok PIK-Remaja yang aktif</i>

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)
				Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kader tribina yang aktif 2. Jumlah kelompok PIK-Remaja yang aktif
	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	3. Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam lembaga pemerintah dan politik	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif
<i>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				<i>Persentase fokus poin OPD yang aktif</i>	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG				Persentase Perangkat daerah yang melaksanakan ARG	
<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				<i>Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif</i>	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang berkompeten	

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	4. Persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang aktif
				<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang aktif</i>
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang terfasilitasi
				Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio kekerasan terhadap anak
				<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terlayani</i>
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam satu tahun

Program dan Kegiatan Pendukung (Kesekretariatan)

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP) OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)
					Nilai SAKIP OPD
				<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yang tersusun</i>
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
				<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang diterima</i>
			2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang diterima
				<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan</i>
					<i>Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi</i>
					<i>Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan pelatihan</i>
				Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan
Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi					
<i>Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan pelatihan</i>					

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021. Proses penyusunan RKPD Tahun 2021 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005–2025, RPJM Provinsi Jawa Timur, RPJPD dan RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan OPD tahun 2021. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (Output) tahun 2021 telah disesuaikan dengan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan penunjang yang diemban oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Madiun. Keberhasilan pelaksanaan Renja tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati OPD serta peran aktif stakeholder dan mitra kerja dalam mendukung dan ikut melaksanakan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA).